



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /40 / C-STR/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT SUTERA,

- Membaca : Surat Wali NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA Nomor : 140/11/WN-KT.TRT/2021 tanggal 2021 perihal Penyampaian Rancangan APB NAGARI KOTO TARATAK Tahun Anggaran 2021;
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagrai Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Nomor tahun 2022 tentang tata cara pembagian dan penetapan ADD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2022
23. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
25. Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid 19;
26. Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19 sebagai bencana nasional;
27. PMK RI nomor 162 tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Dan Dampaknya.
28. Surat Edaran Nomor SE-3/PK/2021 Tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
29. Surat Edaran Menteri Desa PDTT RI nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap darurat COVID 19 dan penegasan Padat karya Tunai Desa;
30. Surat Edaran Mendagri RI nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Mendes PDTT RI nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID 19 dan penegasan padat karya tunai desa;

31. Surat keputusan kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia;
32. Surat Mendagri nomor 440/2703/Sj tanggal 2 April 2020 hal penanggulangan dampak Covid 19 di desa;
33. Surat mendes PD TT RI nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan;
34. Surat mendes PD TT RI nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT Dana Desa; dan
35. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/ /DPM DPPKB-PS/2020 tentang petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Covid 19, Padat Karya Tunai dan BLT DD.

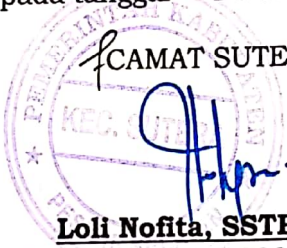
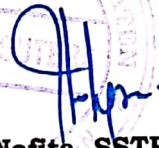
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surantih
pada tanggal Desember 2021


KAMAT SUTERA 

Loli Nofita, SSTP, M.Si

Nip. 19820627 200012 2 001

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 7. Ketua BAMUS NAGARI KOTO TARATAK.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 / 48 / C-STR/2021

TANGGAL : 15 DESEMBER 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 1.538.844.049,00- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 0,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.538.844.049,00-
 - 3) Pendapatan Lain – Lain Rp 0 , -
 - b. Belanja sebesar Rp 1.576.564.048,01,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 473.533.780,01,-
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 750.691.086,00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 118.909.000,00,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 15.000.000,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Rp 218.430.182,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp 37.719.999,01,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 37.719.999,01
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 37.719.999,01
2. Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

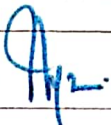
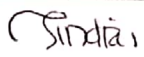
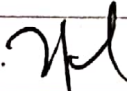
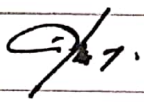
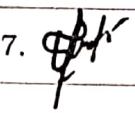
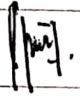
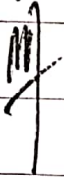
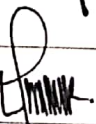
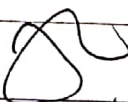
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2022.

Disarankan kepada nagari memperhatikan dan memperbaiki :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan :
 - a. Untuk belanja Perawatan kendaraan plat merah / ambulan, disarankan dikaji ulang kembali .
 - b. Kegiatan Pemutakiran data SDGs, disarankan kepada nagari untuk kegiatan berupa pembaharuan KK / Update data.
 - c. Kegiatan Musyawarah dan Musrenbang, disarankan kepada nagari RKA kegiatan lebih diperjelas.
2. Bidang Pembangunan:
 - a. Transportasi guru MDA , disarankan kepada nagari untuk memantau kegiatan, sehingga jumlah murid bisa valid.
 - b. Kegiatan PMT Kader Yandu, disarankan kepada nagari untuk memantau kegiatan, sehingga jumlah murid bisa valid.
 - c. Kegiatan PMT Stunting dan ibu Hamil, disarankan kepada nagari untuk RKA kegiatan diperjelas lagi.
 - d. Kegiatan Rembuk Stunting, disarankan kepada nagari untuk dihilangkan dan diganti dengan kegiatan pencegahan stunting.

- e. Kegiatan Pembangunan Posyandu, disarankan surat pembebasan lahan, RKA kegiatan diperjelas, dan pagu dana dikaji ulang kembali.
 - a. Kegiatan Pembangunan jalan baru, RAB , dan DED kegiatan harus ada , walaupun baru draf, sehingga RKA dan bentuk kegiatan jelas.
 - b. Untuk kegiatan pembangunan yg bersifat mendesak, harus dilengkapi dengan Justifikasi tekniknya dan Syarat PKTD harus terpenuhi (Permendes no 7 tahun 2021 pasal 8).
 - c. Kegiatan pembangunan RTLH, disarankan kepada nagari untuk KPM RLTH diverifikasi kelengkapan.
 - d. Kegiatan BBGRM, disarankan kepada RKA kegiatan diperjelas, volume kegiatan dikaji ulang kembali.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan
- a. Kegiatan Pelatihan Pemuda, disarankan kepada nagari RKA kegiatan diperjelas.
 - b. Kegiatan Pembuatan Tiang Gawang, disarankan kepada nagari RAB kegiatan diperjelas dan upah dikaji ulang kembali.
 - c. Kegiatan Pelatihan LPMN, Disarankan kepada nagari untuk menjelaskan tujuan dari pelatihan tersebut.
 - d. Kegiatan Pelatihan PKK, disarankan kepada nagari untuk mengkaji ulang kegiatan .
 - e. Kegiatan BLT volume kegiatan diperjelas.

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Loli Nofita, SSTP, M.Si	Ketua	1. 
2.	Sefni Indra Juita, SE	Sekretaris	2. 
3.	Akpal Rizonly	Anggota	3. 
4.	Iwal, S.Pt	Anggota	4. 
5.	Akmal	Anggota	5. 
6.	Eli Suryani	Anggota	6. 
7.	Yul Afrianti, SH	Anggota	7. 
8.	Suprial, ST	Anggota	8. 
9.	H. Novrizal Chan, SH	Anggota	9. 
10.	M. Iqbal	Anggota	10. 
11.	Jumaidi, ST	Anggota	11. 
12.	Chintia Pratama Putri, S.Pd	Anggota	12. 
13.	Ali Afdhal	Anggota	13. 
14.	Khairanilis, SP	Anggota	14. 

Lembar Evaluasi APB Nagari

Kabupaten : Pesisir Selatan

Kecamatan : Sutera

Nagari : Koto Taratak

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	√			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perna tentang APBNagari atau Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari/Perubahan APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang APBNagari/Perna tentang Perubahan APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Perna tentang APBNagari/ Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari	√		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari/Perubahan APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ; Lengkap					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari				

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perma tentang APBNagari/Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKP/Nagari/RKPNagari Perubahan tahun berkenaan	✓		RKP Nagari atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.2	Pendapatan	✓			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realists	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari	-	-	Perna terkait PANagari (misal Perna tentang Pungutan, dll)	Tidak ada PAN
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists	✓			
2.3	Belanja	✓			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	✓			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari	✓		Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		

2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.	√			
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan	√		Peraturan Bupati tentang ADN atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	√		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Wali Nagari dan Perangkat Nagari	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	√		Peraturan Bupati tentang Standar Harga/Standar Biaya Nagari	
2.4	Pembiayaan	√			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	√			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari		√	Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	

2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag		√		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-	Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	√			
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal : Desember 2021

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : Loli Nofita, SSTP, M.Si

Jabatan : Ketua Tim Evaluasi APB Nagari

TTD :

